

**PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN  
PENGEMIS DAN MANUSIA SILVER  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Dimas Reski Kurniawan

NPP. 31.0509

*Asdaf Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : [dimasreskik99@gmail.com](mailto:dimasreskik99@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Ir. H. Boytenjuri, CES

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The problem of poverty that occurs in society has a huge impact on the peace and order that occurs in society. Violations of social order include various actions that can disturb the harmony and welfare of society, such as disturbing behavior, destruction of property, extortion, excessive noise, or violation of the rules that have been established in society. Purpose:* This research was conducted with the aim of finding out the Implementation of Silver Human Counseling and Development in Tulungagung Regency. The theory used in this research is Implementation Theory. **Method:** This research also uses qualitative descriptive research methods. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. **Result:** The results of this research conclude that the counseling and coaching carried out by the Civil Service Police Unit and social services in counseling and coaching beggars and silver men in Tulungagung Regency, East Java Province is quite good when seen from the coordination function and performance effectiveness. Although it still needs to be improved so that it can run more optimally. **Conclusion:** The conclusion of this research shows that the implementation of counseling and coaching silver people is influenced by the existence of supporting factors in counseling and coaching beggars and silver people, namely good community participation and response, good coordination between members of the Civil Service Police Unit to all members, as well as to social and community services. Obstacles in counseling and coaching beggars and silver people are the lack of adequate tools used for control and the lack of public knowledge in responding to beggars and silver people. The efforts of the Civil Service Police Unit to overcome obstacles include dividing the members of the Civil Service Police Unit during raids per squad in Tulungagung Regency and carrying out their respective duties well and professionally, as well as conducting outreach to the community so that the community can respond to the beggars and silver men correctly.

**Keywords:** *Implementation, Counseling, Coaching, Homelessness and Silver Man*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat memberikan dampak yang begitu besar terhadap ketrentaman dan ketertiban yang terjadi dimasyarakat. Pelanggaran ketertiban sosial mencakup berbagai tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat, seperti perilaku meresahkan, perusakan harta benda, pemerasan, kebisingan yang berlebihan, atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Manusia Silver di Kabupaten Tulungagung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Pelaksanaan. **Metode:** Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas sosial dalam penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik jika dilihat dari fungsi koordinasi dan efektivitas kinerja. Meskipun tetap perlu ditingkatkan sehingga bisa berjalan lebih maksimal. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan manusia silver dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dalam penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver yaitu partisipasi dan respon masyarakat yang baik, koordinasi yang baik antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada seluruh anggota, maupun kepada dinas sosial dan masyarakat. Hambatan dalam penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver adalah kurang memadainya alat yang digunakan untuk penertiban serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyikapi pengemis dan manusia silver. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yaitu membagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat penertiban per regu di Kabupaten Tulungagung dan melakukan tugasnya masing masing secara baik dan profesional, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menyikapi pengemis dan manusia silver tersebut dengan benar.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Penyuluhan, Pembinaan, Gelandangan dan Manusia Silver

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berkembangnya permasalahan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehingga terhambat fungsi sosialnya sudah menjadi fenomena umum bagi suatu negara berkembang termasuk Indonesia. Pengentasan akan permasalahan yang berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tentunya menjadi tujuan nasional untuk mencapai pembangunan manusia (Maspaetela, J.M 2014). Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan suatu kebijakan dalam pengembangan nasional teruntuk penyandang masalah sosial yang tersusun, terstruktur, dan berkesinambungan (Zulianda W 2022).

Masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat memberikan dampak yang begitu besar terhadap ketrentaman dan ketertiban yang terjadi dimasyarakat. Pelanggaran

ketertiban sosial mencakup berbagai tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat, seperti perilaku meresahkan, perusakan harta benda, pemerasan, kebisingan yang berlebihan, atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Ini bisa termasuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, tindak kekerasan, vandalisme, atau bahkan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, hal tersebut terjadi karena tindakan yang dilakukan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapat perhatian dari masyarakat agar masyarakat memberikan sesuatu kepada mereka untuk menjalani dan melengkapi kebutuhan kehidupan keseharian mereka. Urgensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memahami akar permasalahan, mengembangkan strategi penanganan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tersebut.

Penanggulangan masalah pengemis dan manusia silver menjadi tanggung jawab negara. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Sementara itu pasal 34 ayat 2 menegaskan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan kemanusiaan". Namun pada kenyataannya pemerintah belum mampu mensejahterakan masyarakatnya, sehingga menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat yaitu pengemis dan manusia silver yang mengakibatkan semakin membludaknya kehadiran mereka.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS. Keteraturan dan kenyamanan masyarakat adalah syarat yang harus dicapai dan juga yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan yang baik, maka diperlukan koordinasi yang bersifat internal maupun lintas batas untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Syamsir & Nofanki Hariandi 2022). Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menyumbang angka penyandang masalah kesejahteraan sosial cukup tinggi ialah Kabupaten Tulungagung. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulungagung mencapai 94.171 orang. Berikut data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung dilihat dari tiga tahun terakhir :

**Tabel 1.1**  
**Data Penanganan PMKS 2020 - 2022**

<b>No</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Anak balita terlantar	2	1	2
2	Anak terlantar	18	20	17
3	Anak yang berhadapan dengan hokum	28	16	5
4	Anak jalanan	32	32	0
5	Anak dengan kedisabilitasan	148	7	4
6	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah	20	4	2
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	153	0	0
8	Lanjut usia terlantar	50	41	53
9	Penyandang disabilitas	239	546	546

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Tuna Susila	0	0	0
11	Gelandangan	13	13	2
12	Manusia silver	0	2	5
13	Pengemis	17	15	40
14	Pemulung	14	14	16
15	Kelompok minoritas	0	0	0
16	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	0	0	0
17	Orang dengan odha	1	3136	3135
18	Korban penyalahgunaan napza	37	5	5
19	Korban trafficking	5	0	0
20	Korban tindak kekerasan	47	5	2
21	Pekerja migran bermasalah social	0	0	0
22	Korban bencana alam	200	324	67
23	Korban bencana social	27	0	0
24	Perempuan rawan sosial ekonomi	2260	9706	9706
25	Fakir miskin	103.125	76.199	80.197
26	Keluarga bermasalah sosial psikologis	42	42	42
27	Komunitas adat terpencil	0	0	0
	Jumlah total	106.478	90.308	94.171

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas, dapat dilihat tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulungagung. Tingginya angka ini tentunya akan sangat berdampak pada penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat Tulungagung. Penyuluhan dan pembinaan merupakan salah satu strategi yang telah lama digunakan untuk mengatasi permasalahan pengemis dan manusia silver di Kabupaten Tulungagung. Satpol PP Kabupaten Tulungagung selama ini telah melakukan upaya penertiban atau penyuluhan secara persuasif kepada pengemis dan manusia silver yang tertangkap operasi. Penanganan pengemis dan manusia silver ini dilakukan karena adanya keluhan atau aduan dari masyarakat bahwa beberapa pengemis dan manusia silver melakukan tindakan yang mengganggu ketenteraman pada masyarakat.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan pada Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Pengemis dan Manusia Silver di Kabupaten Tulungagung. Salah satunya sumber daya manusia yang terbatas dalam hal personil Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Banyaknya pengemis yang merupakan pendatang dan bukan merupakan warga Kabupaten Tulungagung. Selain itu kurangnya dukungan dan motivasi dari masyarakat itu sendiri membuat pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver menjadi terhambat.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Pengemis dan Manusia Silver di Kabupaten Tulungagung. Penelitian oleh S. Afrizal & Ria Risdiana yang berjudul Eksistensi Manusia Silver

pada Masa Pandemi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, menemukan bahwa faktor utama maraknya keberadaan manusia silver di Kecamatan Ciledug dikarenakan faktor ekonomi dan rendahnya daya saing masyarakat dalam dunia pekerjaan, bekerja sebagai manusia silver awalnya cukup menguntungkan namun menjadi menurun ketika pandemi dikarenakan semakin banyaknya jumlah manusia silver membuat titik-titik utama penempatan mereka penuh sehingga hasil yang didapatkan tidak semaksimal awal (S. Afrizal & Ria Risdiana 2022). Penelitian oleh Novi Nur Rahmah yang berjudul Model Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas, menemukan bahwa Model penanganan yang diterapkan yaitu model preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut. Menurut teori struktural fungsionalisme dan teori konflik, model penanganan tersebut dapat menyebabkan disintegrasi sosial karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat miskin (Novi Nur Rahmah 2017). Penelitian oleh Nicky Annisa Dzikri yang berjudul Analisis Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Perda Kab. Tulungagung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Prespektif Hukum Islam, menemukan bahwa Ketidakmampuan ekonomi memaksa mereka untuk mengikuti pekerjaan yang seharusnya dihindari, sedangkan kebutuhan yang terus meningkat memperburuk situasi. Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Nicky Annisa Dzikri 2019). Penelitian oleh Rizka Dwika Ramadani yang berjudul Evaluasi Implementasi Program Desaku Menanti Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padang, menemukan bahwa keseluruhan pelaksanaan program Desaku Menanti belum berjalan optimal, program berjalan masih belum mempunyai sumber daya yang cukup seperti akses jalan kurang layak, sumber air jauh dari rumah, pelatihan yang diberikan belum memberikan dampak yang terukur terhadap peningkatan perekonomian para Gelandangan dan pengemis (Rizka Dwika Ramadani 2024). Penelitian oleh F. Fatmawati yang berjudul Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis Di Kota Bandar Lampung, menemukan bahwa timbulnya pengemis dilatar belakangi oleh dua faktor yaitu faktor internal yang meliputi kemiskinan individu maupun keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta sikap mental. Dan faktor eksternal yang meliputi kondisi permisif dikota, urbanisasi, tidak adanya lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan (F. Fatmawati 2018).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pada Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Pengemis dan Manusia Silver di Kabupaten Tulungagung, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh S. Afrizal & Ria Risdiana, Novi Nur Rahmah, Nicky Annisa, Rizka Dwika Ramadani, dan F. Fatmawati. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda yaitu menggunakan teori Pelaksanaan George R. Terry (dalam Sukarna 2011) yang menyatakan bahwa indikator pelaksanaan yang baik dapat dinilai melalui 4 (empat) dimensi yaitu *motivating*, *directing*, *communicating*, dan *leading*.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Pengemis dan Manusia Silver di Kabupaten Tulungagung.

## **II. METODE**

Penelitian merupakan suatu proses mencari kebenaran serta memecahkan masalah secara sistematis dengan berlandaskan data yang terjadi di lapangan (Nurdin & Hartati 2019). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong 2016). Desain penelitian adalah proses yang terdiri dari segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian (Moh. Nazir 2005). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Simangunsong 2016). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Kabid Rehabilitasi Sosisal Dinsos Kabupaten Tulungagung, Kabid Trantib Satpol PP, Kasi Deteksi Dini Satpol PP, Kasi Pengendalian Operasional Satpol PP, Anggota Satpol PP serta masyarakat Kabupaten Tulungagung. Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2015).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam (Sukarna 2011), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas Satlinmas berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi beserta indikatornya :

### **3.1 *Motivating***

Motivating dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan dan kemampuan individu atau kelompok untuk menjalankan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan. Pada dimensi ini terdapat indikator pemenuhan kondisi kerja serta pemenuhan kebutuhan anggota yang berperan dalam menggerakkan pelaksanaan yang efektif, yaitu :

#### **3.1.1 Pemenuhan Kondisi Kerja**

Pentingnya mengakui bahwa kepuasan kerja karyawan tergantung pada seberapa baik kondisi kerja ini dipenuhi oleh organisasi. Seorang pemimpin dalam hal ini memiliki

tanggungjawab dalam memastikan pemenuhan kondisi kerja yang kondusif. Rasa semangat dan kepuasan pada anggota juga mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu tugas.

### **3.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Anggota**

Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain bertindak (Sukarna 2011). Satpol PP Kabupaten Tulungagung telah berusaha untuk memberikan kenyamanan bagi setiap pegawai agar mereka dapat bekerja secara optimal. Yang paling utama yaitu memenuhi kebutuhan mereka dalam bekerja, seperti pemenuhan fasilitas kesehatan, hak cuti dan pengaturan piket harian yang sesuai dengan hasil musyawarah bersama. Selain itu, pemberian reward kepada anggota yang berprestasi juga dilakukan sehingga mampu mendorong dan memberikan semangat dalam menjalankan meningkatkan kinerjanya sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal. Para anggota organisasi memiliki motivasi yang cukup karena telah mendapat pemenuhan kebutuhan anggota dan kondisi kerja yang kondusif sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya pelaksanaan program penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver di Kabupaten Tulungagung.

### **3.2 Directing**

Menurut George R. Terry dalam (Sukarna 2011) pada dimensi *Directing* terdapat perintah lisan dan perintah tulisan, yakni :

#### **3.2.1 Perintah Lisan**

Sebagai salah satu aspek penting dalam komunikasi di lingkungan kerja. Menurut Terry, perintah lisan adalah instruksi atau arahan yang diberikan secara langsung melalui kata-kata lisan dari atasan kepada bawahan atau antara rekan kerja. Terry menekankan pentingnya perintah lisan dalam memastikan pemahaman yang jelas dan tepat terhadap tugas atau instruksi yang diberikan. Ini melibatkan kemampuan komunikasi yang efektif dari pihak yang memberi perintah untuk menyampaikan pesan dengan jelas, serta kemampuan penerima perintah untuk mendengarkan dengan cermat dan memahami apa yang diminta. Dalam konteks manajemen, perintah lisan dapat berperan dalam memberikan arahan kepada karyawan, koordinasi kegiatan di antara tim atau departemen, serta memastikan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan. Oleh karena itu, Terry menekankan pentingnya kejelasan, ketepatan, dan keberlanjutan dalam perintah lisan sebagai bagian dari proses manajemen yang efektif. Pemberian perintah lisan juga dilakukan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung kepada anggotanya supaya anggota lebih teliti dan hati-hati dalam melaksanakan tugas. Perintah ini bertujuan untuk mengingatkan anggota untuk keberhasilan dan keselamatan anggota. Misalnya seperti sedang melaksanakan penyuluhan di jalan, para anggota hendaknya melakukannya dengan tegas, namun tetap manusiawi.

#### **3.2.2 Perintah Tulisan**

Perintah tulisan merupakan instruksi atau arahan yang diberikan melalui dokumen tertulis, seperti surat, memo, atau email. Terry mengakui bahwa dalam lingkungan kerja, perintah tulisan memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi yang jelas dan tertulis untuk memberikan panduan atau tugas kepada karyawan atau rekan kerja. Terry menekankan pentingnya kejelasan dan ketepatan dalam penyampaian

perintah tulisan. Ini termasuk penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penjelasan yang detail, dan spesifikasi yang jelas tentang apa yang diharapkan dari penerima perintah. Pemberian perintah tertulis pada Satpol PP Kabupaten Tulungagung sudah tercantum pada tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang, sehingga para anggota tinggal melaksanakannya saja. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung

### **3.3 Communicating**

*Communicating* melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan instruksi antara pemimpin dan anggota organisasi, antara anggota organisasi sendiri. Komunikasi yang efektif adalah salah satu elemen kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan rencana atau kebijakan berjalan dengan baik. Terdapat dua indikator dalam dimensi ini yaitu :

#### **3.3.1 Pertemuan Formal**

Pertemuan formal adalah proses yang terstruktur untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pertemuan yang dijadwalkan secara resmi dalam lingkungan kerja. Seorang pemimpin harus dapat memastikan bahwa informasi, instruksi, ide, dan masalah dapat dipertukarkan dengan efektif di sebuah organisasi. Penting bagi seorang pemimpin organisasi untuk mengadakan pertemuan formal untuk melakukan evaluasi bersama tentang pelaksanaan suatu program yang telah dilaksanakan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Satpol PP Kabupaten Tulungagung telah rutin melaksanakan evaluasi formal dengan tujuan mendapat solusi dan jalan keluar yang efektif di setiap permasalahan.

#### **3.3.2 Penyediaan Sarana Masukan Anggota**

Memberikan sarana yang memadai bagi anggota untuk menyampaikan masukan, ide, dan pendapat mereka akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa strategi untuk menyediakan sarana masukan anggota yang efektif. Komunikasi yang baik hendaknya menciptakan lingkungan dimana semua anggota merasa terhubung, terinformasi, dan terlibat dalam proses pelaksanaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, setiap anggota mendapatkan perlakuan yang sama dalam kebebasan menyampaikan masukan demi kebaikan bersama.

### **3.4 Leading**

Leading memiliki fokus utama pada peran penting pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan memberikan teladan kepada anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana atau kebijakan organisasi. Terdapat dua faktor didalam dimensi ini yaitu :

#### **3.4.1 Tujuan Yang Hendak di Capai**

Sebuah tujuan memerlukan manajemen yang efektif, perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya yang tepat, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terus berubah. Masing-masing pemimpin dalam instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sama-sama memiliki tujuan yang hendak dicapai. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung yaitu untuk



memberikan keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung, khususnya mengurangi tingkat gangguan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tulungagung.

### **3.4.2 Kepribadian yang dapat dijadikan teladan**

kepribadian yang dapat dijadikan teladan adalah orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang kuat dan integritas pribadi yang tinggi. Terry mengakui bahwa kepemimpinan yang efektif memainkan peran kunci dalam kesuksesan organisasi, dan individu yang menjadi teladan dalam hal ini memiliki beberapa sifat yang khas. Seorang pemimpin hendaknya juga bisa menjadi tauladan bagi anggotanya. Hal ini sesuai pengakuan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung bahwa Kasatpol PP Kabupaten Tulungagung memiliki karakter yang tegas bersemangat, dan positif sehingga mampu menjadi teladan bagi anggota Satpol PP di Kabupaten Tulungagung.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver di Kabupaten Tulungagung yaitu banyaknya ditemukan bahwa pengemis dan manusia silver yang ada di Kabupaten Tulungagung merupakan pendatang dan bukan warga asli Kabupaten Tulungagung. Penghambat yang kedua yakni kurangnya dukungan dan juga motivasi masyarakat untuk para pengemis dan manusia silver untuk kembali menunaikan kegiatan sosialnya secara normal di masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya Satpol PP juga menjadi penghambat yang harus segera dibenahi, sebab dengan adanya kurangnya sumber daya ini akan menciptakan kurang efektifnya pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Kapasitas Sumber Daya ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi juga untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, mencegah konflik, dan meningkatkan keamanan serta ketertiban umum. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Dwika Ramadani.

## **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pengemis dan manusia silver di Kabupaten Tulungagung oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta Dinas Sosial telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat diukur dengan 4 dimensi yang meliputi *Motivating*, *Directing*, *Communicating* dan *Leading* yang semuanya telah terlaksana dengan baik. Faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pengemis di Kabupaten Tulungagung adalah pengemis dan manusia silver banyak yang berasal dari luar Kabupaten Tulungagung, kurangnya motivasi dan dukungan masyarakat dan keterbatasan Sumber daya. Maka diperlukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver di Kabupaten Tulungagung adalah meningkatkan patroli rutin dalam pelaksanaan penyuluhan terhadap pengemis dan manusia silver, melakukan peningkatan fungsi seksi deteksi dini oleh bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penyuluhan terhadap pelaku PPKS di jalan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat dan

melakukan kerjasama antar daerah untuk mengatasi pengemis yang berasal dari luar daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pengemis dan manusia silver di Kabupaten Tulungagung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dan Kepala Dinas Sosial Tulungagung beserta jajarannya dan Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. cet. 3. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Siagian, S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

### B. JURNAL

- Afrizal, S., & Risdiana, R. (2022). Eksistensi Manusia Silver pada Masa Pandemi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9207-9215. Hamudy, M.I.A. (2014). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3866>
- Dzikri, A. N. (2019). *Analisis Gelandangan Dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perspektif Hukum Islam*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10552/>
- Fatmawati, F. (2018). *Fungsi Dinas Sosial dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/3308/>
- Rahmah, N. Novi. (2017). *Model Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas*. <https://lib.unnes.ac.id/view/year/2017.html>
- Rizka, D. R. (2024). *Evaluasi Implementasi Program Desaku Menanti Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padang*. <http://scholar.unand.ac.id/462266/>

- Maspaitella, M. J. (2014). *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 157-164.
- Nofanki, H., & Syamsir, S. (2022). *Penertiban Pengemis dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang*. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 212-217
- Zulianda, W. (2022). *Pelaksanaan Program Layanan Sosial dan Keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Padang Panjang*. <http://repository.unp.ac.id/47208/>

## **PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

